
INDEKS BIAYA EKONOMI DALAM PERHITUNGAN BANTUAN PARTAI POLITIK KABUPATEN KOTABARU

M Rusmin Nuryadin¹

Irwansyah²

Khubbi Abdillah³

(Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Kalimantan Selatan)

Email: mnuryadin@ulm.ac.id¹; irwansyah@ulm.ac.id²; khubbib@ulm.ac.id³

Article Info

Article history:

Received: Okt 12, 2025

Accepted: Des 10, 2025

Published: Des 25, 2025

Page: 1 – 10

Keyword:

Macro Economic

Industrial Revolution 5.0

Political Parties

Corresponding Author:

Name: Rusmin Nuryadin

E-mail:

mnuryadin@ulm.ac.id

Abstract

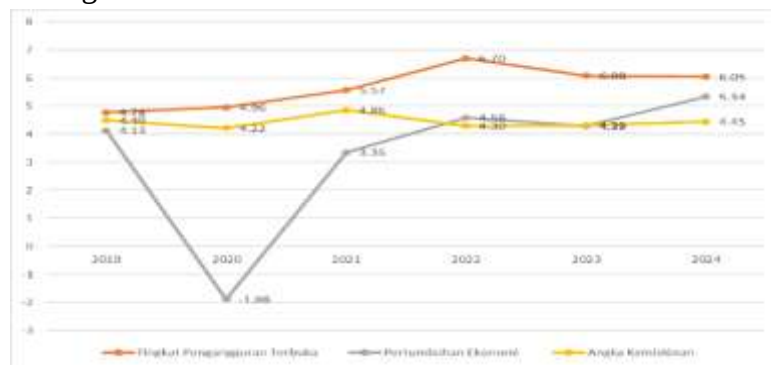
Financial assistance strengthens the existence of Political Parties in carrying out their fundamental role in a democratic society as intermediaries between the community and the government. The increase in financial assistance to Political Parties is analyzed based on the analysis of the results of empirical studies on the implementation of Political Education, macro analysis of Kotabaru Regency, analysis of the fiscal capacity of Kotabaru Regency, regional fiscal capacity of Kotabaru Regency, analysis of the formulation of the calculation of the value of financial assistance to Political Parties. Based on the macroeconomic analysis, the recommended value of assistance per vote is IDR 15,000 per vote. With the value of assistance to political parties of IDR 15,000 per vote in the 2024 election with a total of 164,953 valid votes, the amount of budget required in the 2026 Regional Budget is IDR 2,474,295,000. The formulation and calculation of the economic cost index of financial assistance to Political Parties needs to be made in Regional Regulations, so that the performance indicators of Political Parties and financial assistance can be measured annually.

Pendahuluan

Partai politik di tingkat daerah tidak hanya berfungsi sebagai saluran aspirasi masyarakat dan lembaga pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, tetapi juga memegang peranan yang sangat strategis dalam membentuk kesadaran politik warga negara melalui proses pendidikan politik yang berkelanjutan (Hermawan, 2020). Dalam konteks ini, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diharapkan dapat memperkuat peran dan fungsi partai politik agar lebih efektif dalam menjalankan tugas konstitusionalnya (Maarontong, 2020).

Adapun kontribusi Partai Politik terhadap pembangunan di daerah tercermin dari gagasan dan ide anggota partai Politik yang menduduki jabatan baik di level eksekutif maupun legislatif yang kemudian menghasilkan produk-produk kebijakan dan regulasi yang pro pembangunan dan kemajuan serta kesejahteraan masyarakat di daerah (Yunita dkk., 2024). Dampak kebijakan atau regulasi tersebut dapat diukur menggunakan variabel ekonomi makro diantaranya yaitu angka kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kotabaru (BPS Kabupaten Kotabaru, 2025).

Kabupaten Kotabaru dengan jumlah penduduk lebih dari 348 ribu jiwa menghadapi dinamika sosial-ekonomi yang cukup kompleks. Di satu sisi, angka kemiskinan daerah relatif rendah, yakni berada pada kisaran 4,45 persen pada tahun 2024, yang menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat secara umum. Namun, di sisi lain, terdapat tantangan serius berupa meningkatnya tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 4,78 persen pada tahun 2020 menjadi 6,05 persen pada tahun 2024. Kondisi ini menandakan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi daerah berjalan, distribusi kesempatan kerja belum sepenuhnya merata dan berpotensi memengaruhi stabilitas sosial.



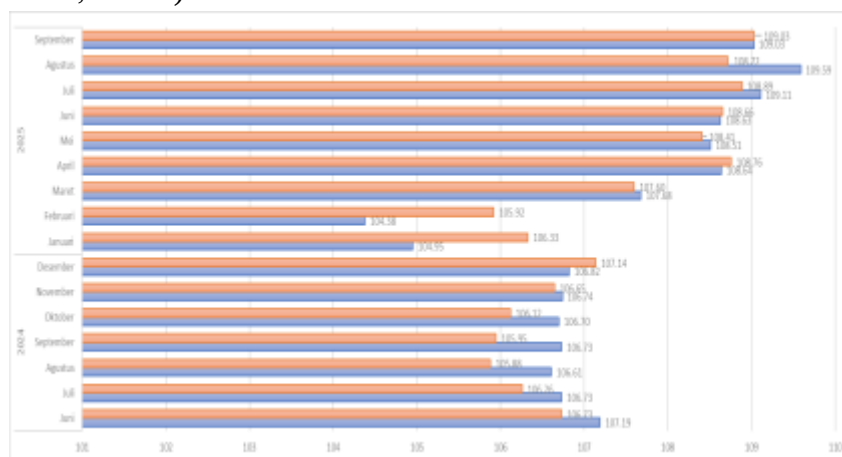
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025b), (2025c), (2025c)

Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi, Angka Kemiskinan, dan TPT Kabupaten Kotabaru 2019-2024

Peningkatan pembangunan dan kesejahteraan rakyat menjadi tugas dan fungsi bagi Partai Politik sebagai wadah perjuangan bagi rakyat (Abdullah, 2014). Partai Politik di daerah juga memiliki tugas untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperjuangkan cita-cita masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat (Riskiyono, 2015).

Dalam konteks Kalimantan Selatan, selama ini Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan telah memberikan bantuan keuangan kepada Partai Politik bersumber dari APBD sebesar Rp.7500 per suara sah per tahun 2024. Pemerintah Kabupaten Kotabaru memberikan

bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp.10.000 per suara. Namun, nilai bantuan tersebut tentunya sudah tergerus oleh inflasi selama Juni 2024-September 2025 yang tercermin dari Indeks Harga Konsumen (IHK). IHK mengukur perubahan rata-rata harga dari sekelompok barang dan jasa yang dikonsumsi rumah tangga. IHK Provinsi Kalimantan Selatan tercatat pada Juni 2024 sebesar 106,73 menjadi 109,03 pada September 2025. IHK Kabupaten Kotabaru meningkat pada Juni 2024 sebesar 107,19 menjadi 109,03 pada September 2025. Artinya, IHK naik dari 106,73 ke 109,03 selama 16 bulan. Kenaikan IHK ini tentunya berdampak pula pada nilai bantuan keuangan kepada Partai politik semakin tergerus. Di sisi lain Partai Politik perlu meningkatkan partisipasi publik masyarakat melalui pendidikan politik (BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2025b).



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Selatan (2025)

Gambar 2. Perkembangan IHK Kabupaten Kotabaru Juni 2024-September 2025

Fenomena ketidakseimbangan antara besaran bantuan keuangan yang diberikan dengan kebutuhan riil partai politik makin terasa dalam beberapa tahun terakhir. Laju inflasi, kenaikan harga barang dan jasa, peningkatan biaya operasional kelembagaan, serta ekspektasi publik terhadap akuntabilitas dan kinerja partai politik menyebabkan dana yang diterima partai politik relatif stagnan dan sulit menjawab tuntutan peran yang diharapkan. Padahal, masyarakat menginginkan agar partai politik lebih proaktif dalam mengadvokasi isu pendidikan, memperjuangkan layanan kesehatan yang lebih merata, serta memperluas peluang kerja dan pemberdayaan ekonomi warga melalui kebijakan daerah yang tepat sasaran (Susanto & Michael, 2023).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka tujuan penelitian untuk menghitung bantuan partai politik di Kabupaten Kotabaru dengan pendekatan indeks biaya ekonomi menggunakan indikator makroekonomi dan variabel keuangan fiskal APBD di Kabupaten Kotabaru, Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2010-2025.

Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka ini berisi tentang referensi yang akan dijadikan acuan untuk menganalisis hasil dan pembahasan penelitian yang telah dilakukan. Termasuk ulasan mengenai teori dan konsep-konsep yang akan digunakan.

Partai politik dalam sistem demokrasi modern merupakan institusi yang memegang peran sentral dalam menjembatani kepentingan rakyat dengan kebijakan negara. Almond & Powell (1978) menegaskan empat fungsi utama partai politik yang membentuk tulang punggung demokrasi, yaitu rekrutmen politik, sosialisasi politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta pengendalian politik. Fungsi-fungsi ini memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara lebih terorganisir, dan memberi ruang bagi terwujudnya pemerintahan yang responsif terhadap aspirasi publik.

Salah satu peran penting yang dijalankan partai politik dalam sistem demokrasi adalah sebagai agen pendidikan politik bagi masyarakat. Fungsi ini menjadi kunci dalam membangun kesadaran politik warga, memperluas partisipasi publik, serta menumbuhkan budaya demokrasi yang sehat dan bertanggung jawab. Huntington & Nelson (1976) menegaskan bahwa pendidikan politik merupakan fondasi bagi terbentuknya masyarakat sipil yang kuat, karena memungkinkan warga memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara sekaligus mendorong keterlibatan aktif dalam proses politik.

Dalam kerangka pemerintahan yang demokratis, kebijakan publik yang baik bukan hanya dinilai dari hasil akhirnya, tetapi juga dari cara kebijakan tersebut dirumuskan, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Konsep *good governance*, sebagaimana dirumuskan oleh UNDP (1997) dalam (Elahi, 2009) dan (Rohman & Hanafi, 2019) menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dalam setiap aspek pemerintahan, termasuk dalam hal penyusunan kebijakan anggaran dan pemberian bantuan keuangan kepada partai politik.

Demokrasi yang sehat bukan hanya ditandai oleh pelaksanaan pemilu secara berkala, tetapi juga oleh keberlangsungan institusi-institusi politik yang kuat dan stabil. Linz & Stepan (1996) melalui *Democratic Consolidation Theory* menegaskan bahwa demokrasi baru hanya dapat bertahan apabila lembaga-lembaga politik yang menopang sistem demokrasi berhasil melembaga dan memperoleh legitimasi dari masyarakat. Konsolidasi demokrasi terjadi ketika semua aktor politik, baik pemerintah, partai politik, maupun masyarakat sipil, menerima aturan main demokrasi sebagai norma yang tidak lagi diperdebatkan.

Demokrasi tidak hanya bertumpu pada institusi formal seperti pemerintah dan partai politik, tetapi juga pada kekuatan jejaring sosial, norma kepercayaan, dan kerja sama yang tumbuh di dalam masyarakat. Konsep *social capital*, sebagaimana dikemukakan oleh Putnam (1993) dalam (Siisiainen, 2003), menyoroti pentingnya modal sosial sebagai perekat yang menjaga kohesi sosial sekaligus memperkuat kualitas demokrasi. Modal sosial tercermin dalam kepercayaan antarwarga, partisipasi dalam organisasi sosial-politik, serta budaya gotong royong dan solidaritas yang hidup dalam masyarakat. Bantuan keuangan yang dialokasikan kepada partai politik bukanlah kebijakan yang berdiri sendiri, melainkan bagian integral dari mandat konstitusi untuk menjamin tegaknya demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan. Landasan normatif kebijakan ini tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, mulai dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Partai Politik, hingga peraturan pemerintah dan peraturan menteri yang lebih teknis (Bmedia, 2022).

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam memecahkan indeks biaya ekonomi dalam perhitungan

bantuan partai politik di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan dengan metode regresi linier berganda dengan pendekatan *mix method*.

Indeks biaya ekonomi (IBE) menggunakan data yang bersumber dari BPS Kalimantan Selatan dan BPS Kabupaten Kotabaru. Indikator makroekonomi yang digunakan yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, Upah Minimum Provinsi, pengeluaran per kapita, dan Produk Domestik Regional Bruto. Selain itu juga menambahkan variabel keuangan belanja daerah, penerimaan daerah, dan Indeks Kapasitas Fiskal Daerah.

Persamaan Indeks biaya ekonomi (IBE) dapat dijelaskan sebagai berikut:

$$PDRB = \beta_3 AK - \beta_4 TPT + \beta_5 UMP + \beta_6 PPK + \varepsilon \quad (1)$$

$$PPK = \alpha - \beta_7 TPT + \beta_8 AK + \beta_9 UMP + \varepsilon \quad (2)$$

$$PD = \beta_1 PDRB \quad (3)$$

$$BD = \beta_2 PDRB \quad (4)$$

$$IBP = \frac{\beta_1 + \beta_2}{2} \times (\text{Rata-rata IKFD Kab Kotabaru})^n \quad (5)$$

$$IBE = IBP \times (\text{uang saku} + \text{transportasi} + \text{konsumsi}) \quad (6)$$

Keterangan:

PD = Penerimaan Daerah

BD = Belanja Daerah

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

AK = Tingkat Kemiskinan

TPT = Tingkat Pengangguran Terbuka

UMP = Upah Minimum Provinsi

PPK = Pengeluaran Per Kapita

IBP = Indeks Bantuan Parpol

IBE = Indeks Biaya Ekonomi

Hasil dan Pembahasan

Indeks biaya ekonomi (IBE) dapat dihitung dengan mengestimasi persamaan (1) sampai persamaan (4) secaraurut. Tabel 1 menunjukkan hubungan antara Tingkat kemiskinan, TPT, UMP, pengeluaran per kapita

Tabel 1. Hubungan Tingkat Kemiskinan, TPT, UMP, Pengeluaran Per Kapita terhadap PDRB

Variabel	Koefisien	Prob
AK	-0,346031	0,0487**
TPT	-46,21899	0,0474**
UMP	0,016427	0,0000*
PPK	1,585999	0,0001*

Sumber: Data diolah (2025)

Hasil analisis pada Tabel 1 menunjukkan bahwa Tingkat kemiskinan dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) berdampak negatif dan signifikan terhadap PDRB. UMP dan pengeluaran per kapita berdampak positif terhadap PDRB. Setiap pengeluaran per kapita mengaami kenaikan sebesar Rp.10.000, maka PDRB akan mengalami kenaikan sebesar Rp.1.582 dan berlaku sebaliknya.

Tabel 2. Hubungan TPT, Tingkat Kemiskinan, UMP terhadap Pendapatan Per Kapita

Variabel	Koefisien	Prob
TPT	-117,6839	0,0249**
AK	-0,874850	0,0388**
UMP	0,956068	0,0000*

Sumber: Data diolah (2025)

Tabel 2 menunjukkan hubungan antara TPT, Tingkat Kemiskinan, UMP terhadap Pendapatan Per Kapita di Kabupaten Kotabaru yang mana TPT dan Tingkat kemiskinan berdampak negatif dan signifikan terhadap pengeluaran per kapita (PPK). Sedangkan, UMP berdampak positif dan signifikan terhadap PPK. Setiap angka TPT mengalami penurunan sebesar 1%, maka pengeluaran per kapita akan mengalami kenaikan sebesar Rp.117.683, kemudian setiap Tingkat kemiskinan mengalami penurunan sebesar 1%, maka pengeluaran per kapita akan mengalami peningkatan PPK sebesar Rp.87.845.

Tabel 3. Hubungan PDRB terhadap Pendapatan Daerah

Variabel	Koefisien	Prob
Log (PDRB)	0,031847	0,0000*

Sumber: Data diolah (2025)

Hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah berdasarkan Tabel 3 diatas menunjukkan bahwa PDRB berdampak positif terhadap pendapatan daerah sebesar 0,031847. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 Miliar, maka pendapatan daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.0,031847.

Tabel 4. Hubungan PDRB terhadap Belanja Daerah

Variabel	Koefisien	Prob
Log(PDRB)	0,031860	0,0000*

Sumber: Data diolah (2025)

Berikutnya, Hubungan PDRB terhadap pendapatan daerah berdasarkan Tabel 4 diatas menunjukkan bahwa PDRB berdampak positif terhadap belanja daerah sebesar 0,031860. Artinya, apabila PDRB mengalami kenaikan sebesar 1 Miliar, maka belanja daerah juga mengalami peningkatan sebesar Rp.0,031860.

Indeks biaya ekonomi dalam besaran biaya partai politik dihitung berdasarkan indikator makroekonomi (Tingkat kemiskinan, TPT, UMP, pengeluaran per kapita, PDRB, pendapatan daerah, belanja daerah, IKFD) berdasarkan Tabel 1,2,3,4. Koefisien variable PDRB pada Tabel 3 dan Tabel 4 diperoleh angka sebesar 0,031847 dan 0,031860. Selanjutnya angka-angka tersebut dibagi dengan 2 dikali dengan rata-rata IKFD pangkat 10 menghasilkan indeks biaya ekonomi sebesar 0,05229.

$$BEI = \frac{0,031847+0,031860}{2} \times (1,64)^{10} = 0,05229 \quad (7)$$

Untuk merumuskan perhitungan bantuan partai politik berdasarkan hasil studi empiris

terdiri dari konsumsi, uang harian, dan transportasi. Selain itu, studi empiris menggunakan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang Standar Biaya Masukan (SBM) yang berlaku pada tahun berjalan. Hasil perhitungan dari analisis yang telah dilakukan, maka kebutuhan minimal, maksimal, dan angka rekomendasi untuk perhitungan bantuan partai politik dapat dihitung sebagai berikut:

Tabel 5. Nilai Bantuan Partai Politik Per Suara untuk Kabupaten Kotabaru

Sumber	Jumlah	Indeks Biaya Ekonomi	Nilai Bantuan Per Suara Sah
PMK SBM (Diklat)	354.000	0,05229	18.511
PMK SBM (Diklat > 8 Jam)	394.000	0,05229	20.603
Kalkulasi (Minimal)	269.000	0,05229	14.066
Kalkulasi (Rekomendasi)	287.000	0,05229	15.007

Sumber: Data diolah (2025)

Kalkulasi rekomendasi nilai bantuan partai politik per suara untuk Kabupaten Kotabaru sebesar 15.007 atau dibulatkan Rp.15.000, dengan biaya konsumsi sebesar Rp.51.000, uang saku sebesar Rp.43.000, transportasi sebesar Rp.18.000 dengan total biaya sejumlah Rp.287.000. Angka yang muncul merupakan angka yang realistis di Kabupaten Kotabaru.

Tabel 6. Kebutuhan Anggaran Keuangan Partai Politik untuk Kabupaten Kotabaru

Wilayah	Jumlah Suara Sah Pemilu 2024	Nilai Bantuan Keuangan Per Suara	Jumlah Anggaran APBD yang dibutuhkan
Banparpol (2025)	164.953	Rp.10.000	Rp.1.649.530.000
Banparpol (2026)	164.953	Rp.15.000	Rp.2.474.295.000
		Selisih	Rp.824.765.000

Sumber: Data diolah (2025)

Dengan nilai bantuan kepada partai sebesar Rp.15.000 per suara sah dengan jumlah suara sah sebesar 164.953, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBD tahun 2026 adalah sebesar Rp.2.474.295.000. Selisih anggaran yang dibutuhkan untuk bantuan partai politik Kabupaten Kotabaru tahun 2026 dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp.824.765.000 dengan tingkat persentase sebesar 50%. Kenaikan ini cukup rasional karena nilai bantuan dari Rp.10.000 menjadi Rp.15.000 dengan peningkatan sebesar Rp.5.000.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah dalam perhitungan bantuan partai politik di Kabupaten Kotabaru dengan pendekatan indeks biaya ekonomi menunjukkan usulan yang cukup rasional. Hal ini disebabkan dari analisis ekonomi makro menunjukkan besaran bantuan yang direkomendasikan sebesar Rp.15.000 per suara dengan jumlah suara sah sebesar 164.953, maka jumlah anggaran yang dibutuhkan dalam APBD Tahun 2026 sebesar Rp.2.474.295.000.

Indeks biaya ekonomi merupakan alat ukur dalam menghitung besaran bantuan keuangan partai politik yang memiliki urgensi strategis untuk memperkuat partai peran politik dalam

Pendidikan politik dan demokrasi daerah. Dengan dukungan APBD yang memadai dan dasar hukum yang kuat diharapkan dapat mendukung keberlanjutan partai politik dalam berkontribusi dalam meningkatkan kualitas demokrasi dan kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, H. (2014). Realokasi kebijakan fiskal: Implikasi peningkatan human capital dan pembangunan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. *Jurnal Bina Praja*, 6(2), 117–128.
- Almond, G. A., & Powell, G. B. (1978). *Comparative politics: System, process, and policy*. (No Title).
- Bmedia, R. (2022). *UUD 1945 & Perubahannya*. Bmedia.
- BPS Kabupaten Kotabaru. (2025). *Kabupaten Kotabaru Dalam Angka*. Vol XV, 2025. Katalog: 1102001.6302, ISSN: 0215-6695.
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025a). *Indeks Harga Konsumen Juni 2024-Juni 2025*. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MiMy/indeks-harga-konsumen.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025b). *Inflasi Juni 2024-Juni 2025*. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MSMy/inflasi.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025c). *Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan (Persen), 2010-2024*. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/Mjk5IzI=/pertumbuhan-ekonomi-menurut-kab-kota.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025d). *Pertumbuhan Penduduk Miskin (P0), 2010-2024*. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTAzIzI=/persentase-penduduk-miskin-p0-%0A.html>
- BPS Provinsi Kalimantan Selatan. (2025e). *Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (Persen), 2010-2024*. <https://kalsel.bps.go.id/id/statistics-table/2/MzcjMg==/tingkat-pengangguran-terbuka-februari-2025.html>
- Elahi, K. Q. (2009). UNDP on good governance. *International Journal of Social Economics*, 36(12), 1167–1180.
- Hermawan, I. C. (2020). Implementasi pendidikan politik pada partai politik di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum Dan Kewarganegaraan*, 10(1).
- Huntington, S. P., & Nelson, J. M. (1976). *No easy choice: Political participation in developing countries*. Harvard University Press.
- Kementerian Keuangan. (2025). *Portal Data SIKD Kabupaten Kotabaru 2010-2024*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?periode=8&tahun=2025&provinsi=16&pemda=01>
- Linz, J. J., & Stepan, A. (1996). *Problems of democratic transition and consolidation: Southern Europe, South America, and post-communist Europe*. jhu Press.
- Maarontong, J. (2020). Fungsi Partai Politik sebagai Sarana Komunikasi Politik 1 (suatu Studi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di Kecamatan Essang Kabupaten Kepulauan Talaud). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 2(6), 1051.
- PMK. (2025). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2025*

Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026.
<https://share.google/QnrcEFsmHfC0ZwXpB>

- Riskiyono, J. (2015). Partisipasi masyarakat dalam pembentukan perundang-undangan untuk mewujudkan kesejahteraan. *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 6(2), 159–176.
- Rohman, A., & Hanafi, Y. (2019). Penerapan prinsip-prinsip good governance dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. *Reformasi*, 9(2), 153–160.
- Siisiainen, M. (2003). Two concepts of social capital: Bourdieu vs. Putnam. *International Journal of Contemporary Sociology*, 40(2), 183–204.
- Susanto, H., & Michael, T. (2023). Akuntabilitas dan Justifikasi Peningkatan Dana Negara Terhadap Partai Politik. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(5).
- TIM Palka Research. (2025). *kenaikan bantuan keuangan partai politik kalimantan selatan*.
<https://www.palka.or.id/>
- Yunita, N. A., Dwi, M. K., Can, G. Y., Aqilla, F. G., Niken, F., Rosa, A. A., & Kuswan, H. (2024). Kontribusi Partai Politik Terhadap Pembangunan Demokrasi Dalam Perspektif Hukum Tata Negara. *AMANDEMEN: JURNAL ILMU PERTAHANAN, POLITIK DAN HUKUM INDONESIA Управлену: Asosiasi Seni Desain Dan Komunikasi Visual Indonesia*, 1(3), 26–43.